

---

<b>Judul</b>	: Anggaran Kemenkum naik, perbanyak pos bantuan hukum
<b>Tanggal</b>	: Selasa, 16 September 2025
<b>Surat Kabar</b>	: Rakyat Merdeka
<b>Halaman</b>	: 3

Anggaran Kemenkum Naik

## Perbanyak Pos Bantuan Hukum

**WAKIL** Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso meminta Kementerian Hukum (Kemenkum) memperbanyak pos bantuan hukum di seluruh daerah. Itu agar masyarakat bisa merasakan bantuan hukum gratis dari Pemerintah.

"Saat ini tidak semua wilayah memiliki pos bantuan hukum. Ini harus menjadi perhatian dan ditanggapi serius Kemenkum," ujar Sugiat dalam raker Komisi XIII dengan Kemenkum di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Ketidaadaan fasilitas tersebut, lanjutnya, karena keterbatasan dana. Informasi tersebut didapatnya dari kantor-kantor wilayah (kanwil) Kemenkum saat Komisi XIII melakukan kunjungan kerja spesifik ke beberapa daerah.

"Jadi kanwil kanwil hukum keluhannya sama, ada keterbatasan anggaran untuk membentuk organisasi bantuan hukum atau pos bantuan hukum," urai anggota Fraksi Gerindra itu.

Kini, Kemenkum tengah menyusun anggaran untuk direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Dia berharap anggaran tersebut dapat memfasilitasi pengadaan pos bantuan hukum di seluruh Indonesia.

Senada, anggota Komisi XIII Vita Ervina mendukung penambahan anggaran Kemenkum sebesar Rp 196 miliar. Namun, dia menyesalkan anggaran tersebut terkesan lebih banyak untuk kebutuhan operasional kementerian.

Seharusnya, kata Vita, banyak program-program kerakyatan yang bisa dilakukan Kemenkum. Seperti memberikan akses pelayanan hukum yang mudah dan murah. Masyarakat membutuhkan ragam program bantuan hukum agar mudah mendapatkan keadilan.

Salah satu program yang harus dijalankan dengan maksimal, sambungnya, yakni pos bantuan hukum di desa-desa. "Kami tentu berharap ada pembangunan seperti program pos bantuan



Sugiat Santoso

hukum di desa-desa bisa segera dilaksanakan dan diperbanyak," ujar politisi PDIP itu.

Sedangkan program lain yang bisa dibuat oleh Kemenkum adalah dengan kegiatan penguanan digitalisasi dan layanan hukum. "Nantinya kegiatan itu akan meningkatkan pelayanan

publik di daerah-daerah ini bisa dirasakan masyarakat," terangnya.

Anggota Komisi XIII Teuku Ibrahim menambahkan, Kemenkum sebaiknya menyediakan anggaran khusus untuk program bantuan hukum gratis dan program pengedukasian masyarakat tentang hukum. Program-program itu bisa membuat masyarakat lebih teredukasi dengan hukum ataupun Undang-Undang (UU) secara umum.

Bantuan hukum gratis itu akan membantu masyarakat yang sedang tersandung masalah hukum untuk mendapat keadilan. "Kami juga berharap peningkatan Digitalisasi bantuan hukum tersebut dapat berjalan dengan baik di tahun 2026 ini," kata Ibrahim.

Anggota Komisi XIII DPR Meity Rahmatia mengingatkan agar penyerapan anggaran Kemenkum berjalan maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal tersebut selalu dinantikan

masyarakat. Sehingga, saat anggaran terserap, hasilnya bisa dirasakan langsung masyarakat.

Dia menjelaskan, awalnya Kemenkum mengusulkan pagu Indikatif 2026 sebesar Rp 6,36 triliun. Setelah proses penyesuaian anggaran menjadi Rp 3,9 triliun dan sempat naik menjadi Rp 4,25 triliun. "Anggaran terbesar terserap pada program dukungan manajemen sebesar Rp 3,19 triliun, itu hampir 80 persen dari total pagu anggaran," katanya.

Meity berharap, anggaran tidak hanya terserap untuk belanja pegawai tapi benar-benar pada bantuan hukum untuk masyarakat. Lewat dana itu, Kemenkum bisa memberikan pelayanan dengan memberikan akses bantuan hukum yang mudah dan murah untuk masyarakat.

"Sehingga, keberadaan Kemenkum bisa memberikan rasa adil bagi masyarakat seperti reformasi hukum yang tertera dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto," tutupnya. ■ PVB